

MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA

Alifia Syahdarani Kirana¹, Siti Sundari²
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur^{1,2}
xoxoshidae346@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh mekanisme *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit serta implementasi *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*. Metode penelitian ini adalah deskriptif komunikatif. Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*). Sampel penelitian sebanyak 66 laporan tahunan dari 22 perusahaan sektor pertambangan batu bara. Data penelitian ini diolah dan dianalisis menggunakan *software* SPSS 25. Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan, a) nilai t kepemilikan institusional sebesar 1,023 dengan nilai signifikansi sebesar $0,310 > 0,05$; b) nilai t dewan komisaris independen sebesar 0,527 dengan nilai signifikansi sebesar $0,600 > 0,05$; c) nilai t komite audit sebesar 0,213 dengan nilai signifikansi sebesar $0,832 > 0,05$; d) nilai t dari CSR adalah negatif sebesar -0,265 dengan nilai signifikansi sebesar $0,792 > 0,05$. Simpulan, mekanisme *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit serta *corporate social responsibility* tidak memiliki kontribusi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI.

Kata Kunci: *Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Insitusional, Komite Audit*

ABSTRACT

This study aims to empirically examine the effect of corporate governance mechanisms as proxied by institutional ownership, independent commissioners, and audit committees as well as the implementation of corporate social responsibility on tax avoidance. This research method is descriptive communicative. The research was conducted on coal mining sector companies listed on the IDX for the 2017-2019 period. The research data used is secondary data obtained from the annual report. The research sample is 66 annual reports from 22 coal mining sector companies. The research data was processed and analyzed using SPSS 25 software. The data analysis method used descriptive statistics and multiple linear regression. The results showed, a) the t-value of institutional ownership was 1.023 with a significance value of $0.310 > 0.05$; b) the t value of the independent board of commissioners is 0.527 with a significance value of $0.600 > 0.05$; c) the audit committee t value is 0.213 with a significance value of $0.832 > 0.05$; d) the t value of CSR is negative at -0.265 with a significance value of $0.792 > 0.05$. In conclusion, the corporate governance mechanism which is proxied by institutional ownership, independent board of commissioners, and

audit committee as well as corporate social responsibility does not contribute to tax avoidance in coal mining sector companies listed on the IDX.

Keywords: *Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Independent Board of Commissioners, Institutional Ownership, Audit Committee*

PENDAHULUAN

Pada beberapa negara yang menganut sistem pajak, termasuk Negara Indonesia, salah satu sumber penerimaan negara terbesar adalah pajak. Hal ini terlihat dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.545,3 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp 1.957,2 triliun di tahun 2019 (www.kemenkeu.go.id). Berikut *tax ratio* Indonesia selama periode 2016-2019.

Tabel 1.
Data Tax Ratio Indonesia Periode 2016-2019

Tahun	PDB (triliun)	Penerimaan Pajak (triliun)	Tax Ratio (%)	Perubahan (%)
2016	12.406,8	1.284,9	10,36	-
2017	13.588,8	1.339,8	9,86	(0,5)
2018	14.837,4	1.315,9	8,86	(1)
2019	15.833,9	1.545,3	9,76	0,9

Sumber: BPS, Kemenkeu, diolah

Pada Tabel 1, *Tax ratio* terlihat fluktuatif yang menunjukkan adanya tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah dalam membayar pajak yang dibuktikan dengan adanya praktik-praktik penggelapan pajak dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* adalah kegiatan bersifat legal yang dilakukan oleh wajib pajak (WP) untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan (Wardani et al., 2016). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, jumlah wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan tidak dapat membayar pajak telah naik dari 5.199 WP (periode 2012-2016) menjadi 9.496 WP (periode 2015-2019). Hal ini membuktikan masih banyak WP badan yang menggunakan skema penghindaran pajak (Rahma, 2021).

Tax avoidance dapat diukur dengan menggunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang merupakan perbandingan beban pajak kini dengan laba sebelum pajak (Arinda & Dwimulyani, 2018). Kasus penghindaran pajak oleh WP badan yang terjadi selama periode 2016-2019 ditunjukkan dengan munculnya salah satu isu penghindaran pajak oleh perusahaan pertambangan di Indonesia. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Global Witness pada tahun 2019, bahwa perusahaan tambang besar di

Indonesia PT Adaro Energy Tbk melakukan penipuan pajak (Sugianto, 2019). Isu *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan pertambangan batu bara dari aktivitas ekspor sebesar 25% dari total nilai ekspor batu bara. Aliran keuangan gelap pada perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia ini menunjukkan adanya penghindaran pajak (Yulawati, 2019).

Laporan tahunan dari 22 perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2017-2019 menunjukkan bahwa seluruhnya melakukan *tax avoidance* dan terlihat fluktuatif pada tahun 2017 dan 2019. Seluruh perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance* dengan angka lebih dari 0,1. Banyaknya perusahaan yang melakukan *tax avoidance* membuktikan bahwa tata kelola perusahaan (*corporate governance*) belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Mekanisme *corporate governance* dapat berjalan dengan baik apabila perusahaan mampu menciptakan hubungan kerjasama yang baik antara pihak eksternal dan internal perusahaan.

Menurut Sutedi (2012) dalam Pratiwi et al., (2016), dalam mekanisme *corporate governance* terdapat beberapa proksi yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit. Namun, Sunarsih & Oktavia (2016) menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* memberikan hasil yang konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sunarsih & Oktaviani (2016) serta penelitian yang dilakukan oleh Puspita & Harto (2014). Hasil yang konsisten tersebut tidak menimbulkan perbandingan hasil, sehingga peneliti dalam penelitian ini memilih tiga proksi dari mekanisme internal *corporate governance*, yang terdiri dari kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit.

Peneliti menyadari bahwa penelitian tentang *tax avoidance* terkait dengan *corporate governance* telah banyak dilakukan, namun peneliti ingin menguji kembali pengaruh mekanisme *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap *tax avoidance* dan menambahkan variabel independen *corporate social responsibility* pada perusahaan sektor pertambangan batu bara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan

corporate social responsibility terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.

KAJIAN TEORI

Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling, 1976 teori agensi dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan memunculkan konflik keagenan yang terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Oleh karena itu, pemilik membutuhkan mekanisme pengawasan agar manajer sebagai agen dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya (Arinda & Dwimulyani, 2018).

Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* mengemukakan bahwa perusahaan bukan kelompok usaha yang hanya melakukan operasinya untuk mencapai tujuan sendiri, tetapi juga harus mampu menciptakan manfaat bagi *stakeholders* atau pemegang kepentingan sebab dukungan *stakeholders* sangat mempengaruhi keberadaan perusahaan yang bersangkutan (Chariri & Ghazali, 2012 dalam Dewi & Gunawan, 2019).

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Shafer & Simmons (2006), *tax avoidance* merupakan suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara (Sandy & Lukviarman, 2015).

Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme *corporate governance* dapat berjalan dengan baik apabila perusahaan mampu menerapkan lima prinsip *corporate governance* dengan kerjasama yang baik antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Marfirah & Syam, 2016). Menurut Sutedi (2012) dalam Pratiwi et al., (2016), mekanisme *corporate governance* dibagi

menjadi dua golongan yaitu mekanisme eksternal dan internal. Mekanisme eksternal meliputi investor, akuntan publik, pemberi pinjaman, dan lainnya. Sedangkan mekanisme internal meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dan kepemilikan *blockholder*, yaitu kepemilikan individu di atas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan manajerial (Sandy & Lukviarman, 2015). Adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat dijadikan sebagai alat monitoring dalam setiap keputusan yang diambil manajemen, sehingga dapat mengurangi atau menghalangi terjadinya *tax avoidance*. Penelitian sebelumnya oleh Arviyanti & Muiz (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh Chasbiandani et al., (2019) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dewan Komisaris Independen

Menurut Wibowo (2010), dewan komisaris independen sebagai perangkat tata kelola perusahaan bertugas untuk memastikan prinsip dan tata kelola perusahaan telah diterapkan dengan baik. Sandy & Lukviarman (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Tinggi atau rendahnya *tax avoidance* ditentukan oleh proporsi komisaris independen. Semakin besar proporsi komisaris independen maka akan semakin rendah *tax avoidance*, begitu pula sebaliknya. Hal ini didukung oleh Maharani & Suardana (2014) bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Komite Audit

Komite audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal. BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance*, jumlah anggota komite audit minimal 3 orang, yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Sandy & Lukviarman, 2015). *Tax avoidance* diduga merupakan tindakan yang dapat menguntungkan dari sisi manajer sepihak. Komite audit dapat mendeteksi *tax avoidance* tersebut, sehingga manajer dapat menyelaraskan kepentingan dengan pemegang saham (Diantari & Ulupui, 2016). Sandy & Lukviarman (2015) menyatakan bahwa semakin banyak jumlah komite audit maka akan semakin rendah *tax avoidance*, begitu juga sebaliknya. Hal ini didukung oleh Sunarsih & Oktavia (2016) bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility (CSR) merupakan respon perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sebagai bentuk tanggungjawab guna mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (Suripto, 2021). Tindakan *tax avoidance* dipandang sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab oleh masyarakat, maka dari itu *tax avoidance* tidak konsisten dengan CSR (Dharma & Noviari, 2017). Hasil penelitian Suripto (2021) menunjukkan CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu *tax avoidance* yang merupakan upaya pengurangan secara legal dengan cara memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan. *Tax avoidance* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel independen terdiri dari kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan *corporate social responsibility*. Kepemilikan Institusional adalah

kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dan blockholder atau individu di atas lima persen (5%) yang tidak termasuk kepemilikan manajerial. Kepemilikan institusional (INST) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki investor institusional}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$$

Dewan komisaris independen bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melakukan *good corporate governance*. Dewan komisaris independen (KOIN) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{KOIN} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}} \times 100\%$$

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit (KOMA) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{KOMA} = \frac{\text{Jumlah komite audit yang berasal dari komisaris independen}}{\text{Jumlah komite audit}} \times 100\%$$

CSR dalam penelitian ini menggunakan indikator pengungkapan CSR yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative (GRI)* yang terdiri dari tujuh tema dengan keseluruhan tema berjumlah 63 item pengungkapan. CSR dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{CSRI} = \frac{\sum Xy}{n}$$

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan tahunan (*annual report*) pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 22 laporan tahunan perusahaan sektor pertambangan batu bara dalam 3 periode dari tahun 2017-2019 yaitu sejumlah 66 data laporan tahunan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diakses melalui *www.idx.co.id*. Teknik analisis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif dan regresi linier berganda dengan *software* SPSS versi 25. Analisis data yang dilakukan adalah uji keabsahan instrument, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik data ditunjukkan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2.
Uji Statistik Deskriptif

	N	Range	Min	Max	Sum	Mean
X1	66	97.00	.00	97.00	3612.23	54.7308
X2	66	41.66	25.00	66.66	2660.25	40.3068
X3	66	1	3	4	206	3.12
X4	66	.6824	.0318	.7142	21.7783	.33
Y	66	1.99017	.0000	1.99017	20.4461	.3098
Valid N (listwise)	66					

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 25

Nilai rata-rata dari kepemilikan institusional (X1) adalah 54,7308 dengan nilai minimum 0 dan maksimum 97. Nilai rata-rata dewan komisaris independen (X2) adalah 40,3068 dengan nilai minimum 25,00 dan maksimum 66,66. Nilai rata-rata komite audit (X3) adalah 3,12 dengan nilai minimum 3 dan maksimum 4. Nilai rata-rata *corporate social responsibility* adalah 0,33 dengan nilai minimum 0,0318 dan maksimum 0,7142. Nilai rata-rata *tax avoidance* (Y) adalah 0,3098 dengan nilai minimum 0 dan maksimum 1,99017.

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas ditunjukkan pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3.
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	Unstandardized Residual	
N		66
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.25221596
Most Extreme	Absolute	.167

Differences	Positive	.167
	Negative	-.167
Test Statistic		.167
Asymp. Sig. (2-tailed)		.251 ^{c,d}

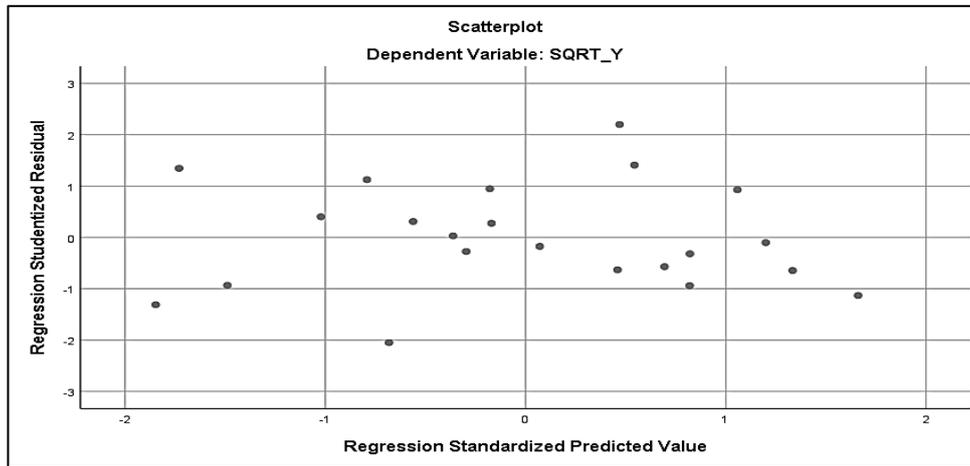
Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,251 atau lebih besar dari 0,05, maka residual terdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada Gambar 1:



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar di atas, titik-titik data telah memenuhi kriteria pengambilan keputusan yaitu titik-titik data tidak menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul, tidak berpola, serta tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi adanya kesamaan varian satu pengamatan ke pengamatan lain.

Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi ditunjukkan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4.
Uji Autokorelasi

Model Summary ^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.416 ^a	.173	.043	.332	2.098

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 25

Pengujian Durbin-Watson perlu melihat tabel Durbin-Watson dengan $\alpha=5\%$, dimana dapat dilihat bahwa nilai dU adalah 1,7319. Maka nilai 4-dU adalah 2,2681. Berdasarkan tabel di atas, nilai d = 2,098, yaitu berada diantara dU dan 4-dU, artinya tidak terjadi autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan Tabel 5 berikut:

Tabel 5.
Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 X1	.872	1.147
X2	.961	1.041
X3	.831	1.204
X4	.816	1.226

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10,00, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen.

Regresi Linier Berganda

Hasil uji regresi linear berganda ditunjukkan pada Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6.
Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.095	.643		-.148	.883
	X1	.019	.019	.139	1.023	.310
	X2	.032	.061	.068	.527	.600
	X3	.029	.137	.030	.213	.832
	X4	-.083	.314	-.037	-.265	.792

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 25

Dari Tabel 6 didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = -0,095 + 0,019X_1 + 0,032X_2 + 0,029X_3 - 0,083X_4 + e$$

Berdasarkan persamaan linier berganda tersebut, diketahui bahwa nilai konstanta sebesar -0,095, artinya jika kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan *corporate social responsibility* dianggap konstan, maka nilai *tax avoidance* sebesar -0,095. Koefisien regresi kepemilikan institusional sebesar 0,019, artinya setiap kenaikan 1% kepemilikan institusional dapat meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,019. Koefisien regresi dewan komisaris independen sebesar 0,032, artinya setiap kenaikan 1% dewan komisaris independen dapat meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,032. Koefisien regresi komite audit sebesar 0,029, artinya setiap kenaikan 1% komite audit dapat meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,029. Koefisien regresi CSR sebesar -0,083, artinya setiap kenaikan 1% CSR dapat menurunkan *tax avoidance* sebesar 0,083.

Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai t kepemilikan institusional sebesar 1,023 dengan nilai signifikansi sebesar 0,310 karena lebih besar dari 0,05 maka H₁ tidak dapat diterima. Artinya kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Nilai t dewan komisaris independen sebesar 0,527 dengan nilai signifikansi sebesar 0,600 karena lebih besar dari 0,05 maka H₂ tidak dapat diterima. Artinya komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Nilai t komite audit sebesar 0,213 dengan nilai signifikansi sebesar 0,832 karena lebih besar dari 0,05 maka H₃ tidak dapat diterima. Artinya komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan nilai t dari CSR adalah negatif sebesar -0,265 dengan nilai signifikansi sebesar 0,792 lebih besar dari 0,05 karena lebih besar dari 0,05 maka H₄ tidak dapat diterima. Artinya CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar

di BEI. Hal ini menunjukkan berapapun jumlah kepemilikan institusional tidak dapat mengurangi atau menghalangi manajemen untuk melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Arviyanti & Muiz (2018), bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Begitu pula Sandy & Lukviarman (2015) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil analisis, dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI. Hal ini menunjukkan berapapun proporsi dewan komisaris independen tidak dapat mengurangi atau menghalangi terjadinya *tax avoidance*. Hasil analisis menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang artinya ada kemungkinan bahwa dewan komisaris independen dalam mekanisme *corporate governance* tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik dalam pengambilan keputusan pajak pada perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Mahanani et al., (2017) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Sandy & Lukviarman (2015) bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil analisis, komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI. Hal ini menunjukkan berapapun jumlah komite audit dalam perusahaan tidak dapat mengurangi atau menghalangi terjadinya *tax avoidance*. Hasil analisis menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang artinya keberadaan komite audit dalam perusahaan kurang berperan aktif dalam penetapan kebijakan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahanani et al., (2017) bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Maharani & Suardana (2014) bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil analisis, *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar

di BEI. Hal ini menunjukkan bagaimanapun tingginya tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan tidak dapat menurunkan atau menghalangi terjadinya *tax avoidance*. Hasil analisis menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang artinya dalam penerapan prinsip CSR untuk pajak perusahaan masih meliputi tindakan yang dapat mengurangi kewajiban pajak melalui *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahanani et al., (2017) bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dharma & Noviari (2017) bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

SIMPULAN

Mekanisme *Corporate Governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, Dewan komisaris independen, dan Komite audit secara parsial tidak memiliki kontribusi terhadap *tax avoidance*, begitu pula *Corporate social responsibility* tidak memiliki kontribusi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinda, H., & Dwimulyani, S. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 123-140. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.5246>
- Arviyanti, A., & Muiz, E. (2018). "Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak / Tax Avoidance Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar Pada BEI Tahun 2013-2016. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 28-46. <http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/22>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Pendapatan Nasional Indonesia 2015-2019*. www.bps.go.id.
- Bursa Efek Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan*. www.idx.co.id.
- Chasbiandani, T., Triastuti, & Ambarwati, S. (2019). Pengaruh Corporation Risk dan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(2), 115-129. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/article/view/4451>

- Dewi, R. R., & Gunawan, I. D. (2019). Implications Of CSR And GCG On Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 23(2), 195-212. <https://doi.org/10.24912/ja.v23i2.577>
- Dharma, N. B. S., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 529-556. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/24562>
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. G. K. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 702-732. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/20664>
- Kementerian Keuangan. (2022). *Realisasi Penerimaan Negara 2015-2019*. www.kemenkeu.go.id.
- Mahanani, A., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Sales Growth, dan CSR Terhadap Tax Avoidance. *IENACO*, 732-742. <http://hdl.handle.net/11617/8600>
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 525-539. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/9290>
- Marfirah, D., & Syam BZ, F. (2016). “Pengaruh Corporate Governance dan Leverage terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AKuntansi Ekonomi (JIMEKA)*, 1(2), 91-102. <https://www.neliti.com/id/publications/186952/pengaruh-corporate-governance-dan-leverage-terhadap-tax-avoidance-pada-perusaha>
- Pratiwi, F. L., Endang, S. R. A., & Purwanto, N. (2016). Analisis Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1), 1-15.
- Puspita, S. R., & P, Harto. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1-13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6172>
- Rahma, A. (2022). *9.496 Perusahaan Tak Mampu Bayar Pajak Karena Rugi*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4593256/9496-perusahaan-tak-mampu-bayar-pajak-karena-rugi>
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur. *JAAI*, 19(2), 85-98. <https://journal.uui.ac.id/JAAI/article/view/4328>
- Sugianto, D. (2022). *Ramai Isu Adaro Akali Pajak, DJP Bisa Manfaatkan Aeol*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4613035/ramai-isu-adaro-akali-pajak-djp-bisa-manfaatkan-aeol>

- Sunarsih, U., & K. Oktaviani. (2016). Good Corporate Governance in Manufacturing Companies Tax Avoidance. *Jurnal Etikonomi*, 15(2), 85-96. <https://media.neliti.com/media/publications/194863-EN-good-corporate-governance-in-manufacturi.pdf>
- Suripto, S. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit, dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 5(1), 1651-1672. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1247>
- Wardani, A. K., Anggra, E., & Amirah, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Good Corporate Governance (GCG), dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *PERMANA*, 7(2), 1-23. <http://e-journalfb.ukdw.ac.id/index.php/jrak/article/view/294>
- Yulawati. (2022). *Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pusaran Batu Bara*. <https://katadata.co.id/yulawati/indepth/5e9a554f7b34d/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara>